



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA CIREBON 2017



DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK



Serve You Better

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KOTA CIREBON TAHUN 2017

Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon Tahun

Ukuran Buku : 255 mm x 180 mm

Jumlah Halaman : 34 + vii hal

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Cirebon

Gambar Sampul:

Badan Pusat Statistik Kota Cirebon

Diterbitkan oleh:

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Cirebon

Boleh mengutip dengan mencantumkan sumbernya

SAMBUTAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK
KOTA CIREBON

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas terbitnya buku "Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon 2016" yang merupakan hasil kajian Dinas Komunikasi, Informasi Dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tentang gambaran kondisi pembangunan terutama pembangunan manusia yang dihitung menggunakan metode baru dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan terbitnya buku Indeks Pembangunan Manusia ini. Semoga buku ini bermanfaat, terutama bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat pada umumnya.

Cirebon, Desember 2017
Dinas Komunikasi, Informasi Dan Statistik
Kota Cirebon
Kepala,

IING DAIMAN, S.IP. M.SI.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon 2017 merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan data secara berkesinambungan, sehingga perkembangan pembangunan dapat dipantau dari waktu ke waktu.

Dalam publikasi ini disajikan indikator-indikator pembangunan manusia Kota Cirebon yang dihitung menggunakan metode baru. Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup penduduk di Kota Cirebon .

Pada kesempatan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Cirebon, Desember 2017
Badan Pusat Statistik Kota Cirebon
Kepala,

Imron Budianto, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel Lampiran	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pengertian	1
1.2. Manfaat	2
1.3. Sumber Data	2

BAB II METODOLOGI PERHITUNGAN IPM

2.1. Perubahan Metodologi IPM	3
2.2. Perbandingan Metode Lama dengan Metode Baru	3
2.3. Keunggulan IPM Metode Baru	4
2.4. Variabel dalam IPM Metode Baru	4
2.5. Rumus Penghitungan IPM	5
2.6. Ukuran Perkembangan IPM	6
2.7. Tingkatan Status Pembangunan Manusia	7

BAB III POTENSI DAN TANTANGAN KOTA CIREBON

3.1. Geografi dan Administrasi Pemerintahan	9
3.2. Ekonomi	9
3.3. Penduduk	11
3.4. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	15
3.5. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan	17

BAB IV INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONENNYA

4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon Metode Baru	19
4.2. Kesehatan	20
4.3. Pendidikan	21

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	25
5.2. Saran-saran	26

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM 6
Tabel 2.2	Status Pembangunan Menurut Skala Internasional 7
Tabel 3.1	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Kota Cirebon, Tahun 2012-2015 10
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Cirebon, Tahun 2014 – 2015 11
Tabel 3.3	Persentase Luas Wilayah, Persentase Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cirebon, Tahun 2015 13
Tabel 3.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan Kota Cirebon, Tahun 2015 14
Tabel 3.5	Indikator Ketersediaan Berbagai Tenaga/Sarana Kesehatan di Kota Cirebon, Tahun 2015 16
Tabel 3.6	Indikator Ketersediaan Sarana Pendidikan di Kota Cirebon, Tahun 2015 17
Tabel 4.1	Perkembangan IPM dan Komponennya di Kota Cirebon, Tahun 2012 – 2015 (Metode Baru) 20

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1	Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kota Cirebon, Tahun 2015 12
Gambar 3.2	Angka Beban Tanggungan Penduduk Kecamatan di Kota Cirebon, Tahun 2015 25
Gambar 4.1	Angka Harapan Hidup Kota Cirebon 21
Gambar 4.2	Angka Harapan Lama Sekolah Kota Cirebon 22
Gambar 4.3	Rata-rata Lama Sekolah Kota Cirebon 23
Gambar 4.4	Pertumbuhan IPM Kota Cirebon dan Provinsi Jawa Barat, 2012-2015 28

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel 1	Angka IPM dan Komponennya Kota Cirebon Tahun 2013-2016 (Metode Baru)
Tabel 2	Angka IPM dan Komponennya Menurut Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2016 (Metode Baru)
Tabel 3	Angka IPM dan Komponennya Menurut Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2016 (Metode Baru)
Tabel 4	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Cirebon Tahun 2016
Tabel 5	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cirebon Tahun 2016
Tabel 6	Penduduk Menurut Kacamatan, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Cirebon Tahun 2016
Tabel 7	Persentase Penduduk Menurut Kacamatan, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Cirebon Tahun 2016
Tabel 8	Penduduk Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur di Kota Cirebon, Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nations Development Programme-UNDP*).

Pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Di antara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Model ini meletakkan manusia bukan sebagai alat bagi pembangunan, tetapi manusia diletakkan sebagai tujuan akhir dari pembangunan, melalui proses pembangunan untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia.

Pembangunan manusia telah menjadi rujukan dalam kebijakan pembangunan di Kota Cirebon. Untuk mengukurnya, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*a decent standard of living*). Melalui analisis IPM ini dapat dilihat gambaran tentang sejauh mana pemerintah Kota Cirebon telah mampu meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Faktor-faktor apa saja yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan taraf kesejahteraan dan kualitas penduduk Kota Cirebon tersebut.

1.1. PENGERTIAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*a decent standard of living*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses

hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

1.2. MANFAAT

Manfaat yang dapat diperoleh dari data IPM antara lain adalah:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.
3. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi umum (DAU).

1.3. SUMBER DATA

Untuk bahan perhitungan IPM tahun 2016 digunakan data yang diperoleh dari hasil berbagai survei yang dilakukan oleh BPS, sedangkan data pendukung lainnya adalah hasil Proyeksi Penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010.

BAB II

METODOLOGI PERHITUNGAN IPM

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. Pada tahun 2010 UNDP merubah metodologi meliputi perubahan komponen IPM yang digunakan dan metode agregasi yang digunakan rata-rata geometrik. Mulai tahun 2014 metode penghitungan IPM yang baru akan digunakan untuk pelaporan IPM di seluruh wilayah.

2.1. Perubahan Metodologi IPM

Beberapa alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM adalah:

1. Komponen indikator saat ini ada yang sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh, karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat digunakan untuk membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
2. PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM sebelumnya menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

2.2 Perbandingan Metode Lama dengan Metode Baru

1. Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
2. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

2.3. Keunggulan IPM Metode Baru

1. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam mengukur perkembangan pendidikan dan perubahan yang terjadi.
2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian dan kinerja yang sama besar karena sama pentingnya.

2.4. Variabel dalam IPM Metode Baru

Dimensi dasar IPM adalah umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*a decent standard of living*).

Dimensi umur panjang dan sehat diukur dengan angka harapan hidup saat lahir ($AHH-e_0$). Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sedangkan angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan metode Rao dengan menggunakan lokasi Jakarta Selatan sebagai acuan wilayah.

Rumus penghitungan PPP adalah sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

dimana:

p_{ij} = harga komoditas i di kab/kota j
 p_{ik} = harga komoditas i di Jakarta Selatan
m = jumlah komoditas

2.5. Rumus Penghitungan IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan : $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$

Dimensi Pendidikan : $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran :

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata lama sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352** (Rp)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

2.6. Ukuran Perkembangan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Ukuran ini menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2.7. Tingkatan Status Pembangunan Manusia

Capaian IPM dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

Tabel 2.2
Status Pembangunan Menurut Skala Internasional

Capaian IPM	Klasifikasi
$IPM \geq 80$	Sangat Tinggi
$70 \leq IPM < 80$	Tinggi
$60 \leq IPM < 70$	Sedang
$IPM < 60$	Rendah

BAB III

POTENSI DAN TANTANGAN KOTA CIREBON

3.1. GEOGRAFI DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Wilayah geografi Kota Cirebon berbentuk dataran rendah dengan topografinya datar (*Flat*), menurut data Potensi Desa 2014, beberapa kecamatan memiliki letak geografis berupa pesisir pantai (*Coast*), yaitu Kecamatan Lemahwungkuk dan Kejaksan, sedangkan untuk tiga kecamatan lainnya, letak geografisnya berupa daerah dataran (*Plain*).

Kota Cirebon ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Propinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah administrasi sebesar 37,37 km², yang terbagi menjadi 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Wilayah kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Harjamukti sebesar 47,15 persen dari luas wilayah Kota Cirebon. Kemudian terluas kedua adalah Kecamatan Kesambi, yang luasnya sekitar 21,57 persen. Selanjutnya berturut-turut Kecamatan Lemahwungkuk (17,42 persen), Kejaksan (9,69 persen) dan Pekalipan (4,17 persen).

3.2. EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon sebesar 5,95. Sementara pada tahun 2013 PDRB Kota Cirebon tumbuh 4,90 persen dan pada tahun 2014 tumbuh 5,71 persen dan pada tahun 2015 pertumbuhannya sebesar 5,80 persen.

Kontribusi sektoral terbesar pada tahun 2016 ditunjukkan oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencapai angka 32,65 persen, disusul kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,53 persen, konstruksi sebesar 10,30 persen, industri pengolahan sebesar 10,26 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 10,21 persen. Kontribusi sektoral secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Kota Cirebon
Tahun 2013-2016

Indikator	2013	2014 ^{*)}	2015 ^{*)}	2016 ^{**)}
1. Pertumbuhan PDRB (%)	4,90	5,71	5,80	5,95
2. Kontribusi PDRB (%)				
- Pertanian	0,35	0,33	0,32	0,31
- Pertambangan/Penggalian	-	-	-	-
- Industri Pengolahan	10,51	10,58	10,41	10,26
- Pengadaan Listrik dan Gas	1,22	1,12	0,97	0,91
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	0,28	0,27	0,27
- Konstruksi	10,64	10,49	10,44	10,30
- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32,32	33,06	32,75	32,65
- Transportasi dan Pergudangan	10,53	10,38	10,36	10,21
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,81	4,83	4,88	4,97
- Informasi dan Komunikasi	4,76	5,25	5,74	6,16
- Jasa Keuangan dan Asuransi	10,99	10,58	10,54	10,53
- Real Estat	0,96	0,94	0,94	0,94
- Jasa Perusahaan	0,84	0,84	0,85	0,86
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,76	3,83	3,72	3,67
- Jasa Pendidikan	3,07	3,25	3,36	3,41
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,87	2,09	2,21	2,25
- Jasa Lainnya	2,09	2,15	2,23	2,29

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

3.3. PENDUDUK

Jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2016 (BPS Provinsi Jawa Barat, hasil proyeksi sementara) mencapai 310.486 orang, dengan komposisi 155.677 orang laki-laki dan 154.809 orang perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 100,56. Rasio jenis kelamin memperlihatkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin 100,56 artinya terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan, atau dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kota Cirebon lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan walaupun jumlahnya hampir sebanding.

Dari tahun ke tahun penduduk Kota Cirebon terus bertambah jumlahnya. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) menurut periode tahun 2015-2016, lajunya sebesar 0,52 persen.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk
menurut Kecamatan di Kota Cirebon, 2015-2016

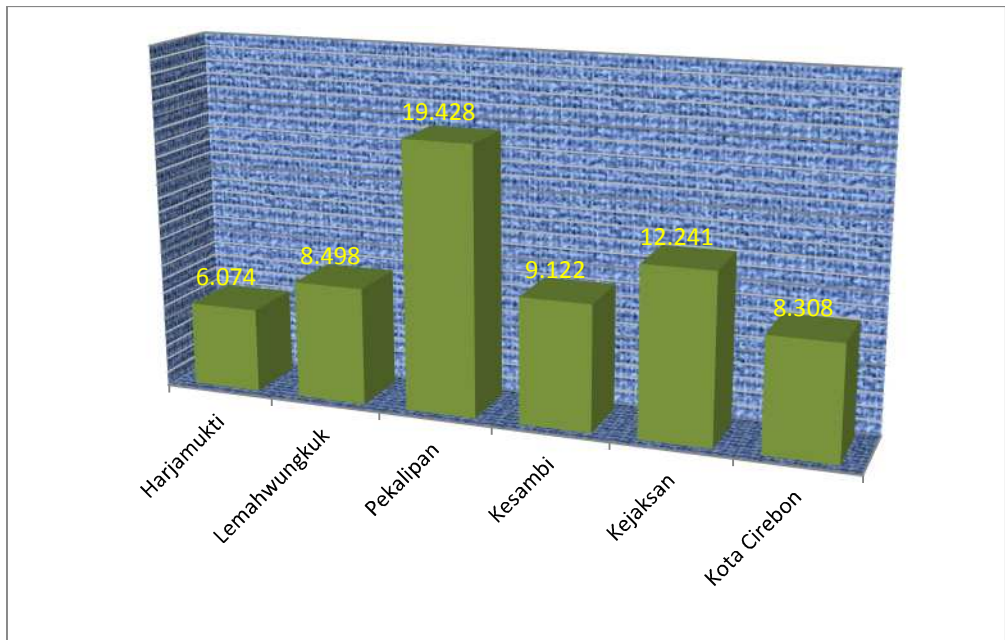
Kecamatan	2015	2016*)
Harjamukti	105.987	107.019
Lemahwungkuk	54.788	55.320
Pekalipan	30.013	30.308
Kesambi	72.819	73.525
Kejaksan	43.887	44.314
Kota Cirebon	307.494	310.486

*) Angka sementara

Bertambahnya penduduk Kota Cirebon akan menyebabkan kepada semakin meningkatnya kepadatan penduduk di Kota Cirebon, dari tingkat kepadatan sebesar 8.228 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2015, menjadi sebanyak 8.308 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2016. Dari Gambar 3.1. di bawah ini, Kecamatan

Pekalipan merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi di Kota Cirebon, yang kepadatannya pada tahun 2016 mencapai 19.428 jiwa per kilometer persegi, terpadat kedua adalah Kecamatan Kejaksan yaitu sekitar 12.241 jiwa per kilometer persegi. Kemudian berturut-turut adalah Kecamatan Kesambi (9.122 jiwa per km²), Kecamatan Lemahwungkuk (8.498 jiwa per km²), dan tingkat kepadatan yang paling rendah adalah Kecamatan Harjamukti yaitu sekitar 6.074 jiwa per kilometer persegi.

Gambar 3.1.
Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan di Kota Cirebon,
Tahun 2016 (jiwa/km²)



Berbedanya tingkat kepadatan kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Cirebon ini, perlu mendapatkan perhatian lebih adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Karena dengan terbatasnya lahan pemukiman akan menyebabkan tempat pemukiman tersebut menjadi tidak sehat.

Di samping itu, penyebaran penduduk secara merata akan memudahkan dalam pelaksanaan pembangunan, juga hasil dari pembangunan itu sendiri akan secara merata dapat dirasakan pada seetiap wilayah (kecamatan).

Distribusi atau penyebaran penduduk ini bisa saja dengan pengaturan melalui pengalihan penduduk dari yang padat ke yang masih jarang, atau dengan pengembangan kegiatan-kegiatan perekonomian di daerah sepi, sehingga secara spontan penduduk yang belum mendapat kesempatan kerja atau untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan beralih/pindah ke daerah tersebut.

Mekanisme alternatif-alternatif tadi perlu diperkuat pula dengan diterbitkannya peraturan-peraturan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat banyak sebagai manifestasi dari tujuan diselenggarakannya otonomi daerah.

Tabel 3.3
Persentase Luas Wilayah, Persentase Jumlah Penduduk dan
Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Cirebon, 2016

Kecamatan	Persentase Luas Wilayah	Persentase Jumlah Penduduk	Tingkat Kepadatan Penduduk per Km²
Harjamukti	47,15	34,4	6.017
Lemawungkuk	17,42	17,8	8.419
Pekalipan	4,17	9,8	19.227
Kesambi	21,57	23,7	9.036
Kejaksan	9,69	14,3	12.137
Kota Cirebon	100,00	100,00	8.308

Penduduk Kota Cirebon dilihat dari komposisi umur, yang secara umum, pada tahun 2016 ini terdiri dari kelompok penduduk usia muda (penduduk yang berumur dibawah 15 tahun) sebesar 26,03 persen, kelompok umur produktif (berumur 15-64 tahun) sebesar 69,32 persen dan kelompok umur lanjut usia

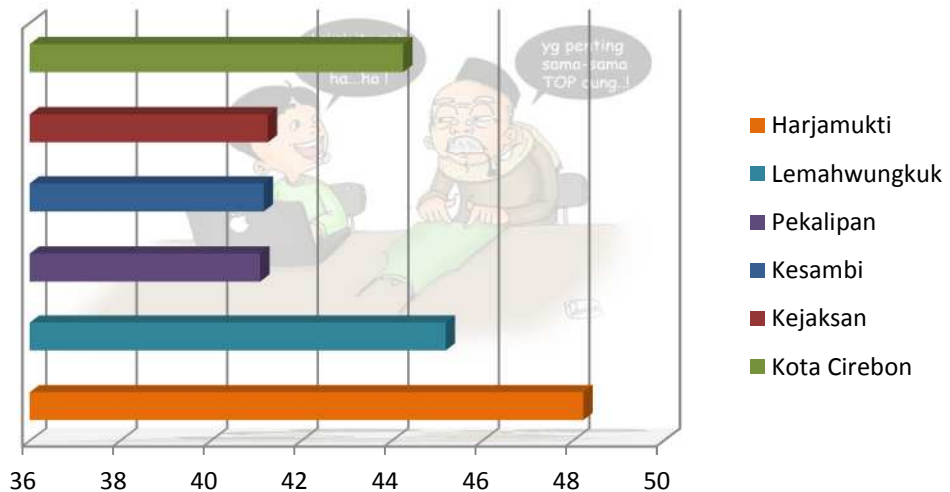
(berumur 65 tahun ke atas) sebesar 4,65 persen. Dengan demikian struktur umur penduduk Kota Cirebon merupakan struktur transisi dari penduduk muda ke penduduk tua, karena kelompok umur muda proporsinya lebih rendah dari 40 persen, dan kelompok umur tua belum mencapai 10 persen.

Tabel 3.4
Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur
dan Kecamatan Kota Cirebon, Tahun 2016

Kecamatan	0 – 14 Tahun	15- 64 Tahun	65 Tahun ke atas
Harjamukti	30.614 (28.61)	72.200 (67.46)	4.205 (7.86)
Lemawungkuk	14.560 (26.32)	38.103 (68.88)	2.657 (4.80)
Pekalipan	6.920 (22.83)	21.480 (70.87)	1.908 (6.30)
Kesambi	18.139 (24.67)	52.084 (70.84)	3.302 (4.49)
Kejaksan	10.588 (23.89)	31.370 (70.79)	2.356 (5.32)
Kota Cirebon	80.821 (26.03)	215.237 (69.32)	14.248 (4.65)

Demikian pula halnya dengan komposisi penduduk kecamatan-kecamatan tidak jauh berbeda, yakni memiliki struktur umur penduduknya memiliki struktur transisi dari penduduk muda ke penduduk tua. Dari Tabel 3.4. tampak penduduk berumur muda (berumur dibawah 15 tahun) proporsinya mulai 22,83 persen sampai 28,61 persen dan penduduk yang berumur lanjut (berumur 65 tahun ke atas) proporsinya dari 4,49 persen sampai 7,86 persen.

Gambar 3.2.
Angka Beban Tanggungan Penduduk Kecamatan
di Kota Cirebon, Tahun 2016



Komposisi penduduk tersebut dapat menggambarkan Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*), dari pada Gambar 3.2, angka beban tanggungan penduduk Kecamatan Pekalipan adalah yang paling rendah, yaitu 41,10 yang artinya diantara 100 penduduk Kecamatan Pekalipan yang berumur produktif akan menanggung sekitar 41 sampai 42 orang penduduk umur tidak produktif. Lalu angka beban tanggungan terendah kedua adalah Kecamatan Kesambi yaitu 41,17. Kemudian Kecamatan Kejaksan (41,26), dan Kecamatan Lemahwungkuk (45,19) dan yang tertinggi angka beban tanggungannya adalah Kecamatan Harjamukti mencapai 48,23.

3.4. KETERSEDIAAN FASILITAS KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan dalam jumlah yang cukup dan layak sangat penting didalam upaya peningkatan derajat kesehatan penduduk. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kota Cirebon dalam

upaya meningkatkan derajat kesehatan penduduk, berupaya melakukan peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Pada Tabel 3.5 di bawah ini disajikan mengenai ketersediaan berbagai tenaga dan sarana kesehatan di Kota Cirebon.

Pada tahun 2016, jumlah dokter yang ada di Kota Cirebon, baik dokter spesialis maupun dokter umum berjumlah 344 orang, dari sejumlah dokter yang ada di Kota Cirebon ini jika dibagi dengan jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2016 tersedia sekitar 11 dokter untuk setiap 10.000 penduduk Kota Cirebon. Sementara itu, untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (pustu) yang merupakan pusat pelayanan kesehatan terdepan, pada tahun 2016 telah terdapat di setiap kecamatan, yang jumlahnya mencapai 38 unit. Jika dilihat dari rasio puskesmas/pustu dengan penduduk, maka untuk setiap 10.000 penduduk Kota Cirebon akan tersedia sekitar 1- 2 puskesmas/pustu, sedangkan data untuk rumah sakit di Kota Cirebon pada tahun 2015 menunjukkan tersedianya 11 rumah sakit (RS), yang terdiri dari RS umum, RS bersalin maupun RS khusus. Sebelas rumah sakit ini memiliki kapasitas 1.099 tempat tidur. Dengan jumlah tersebut berarti untuk setiap 10.000 penduduk tersedia sekitar 35 tempat tidur.

Tabel 3.5
Indikator Ketersediaan Berbagai Tenaga/Sarana Kesehatan
di Kota Cirebon, 2016

Tenaga/Sarana Kesehatan	2016
Jumlah dokter (umum + spesialis)	344
Jumlah dokter (umum + spesialis) per 10.000 penduduk	11
Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu	38
Jumlah Puskesmas per 10.000 penduduk	1,2
Jumlah Rumah Sakit umum/Bersalin/Khusus	11
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	1.099
Jumlah Tempat Tidur per 10.000 penduduk	35,4

Berdasarkan data Cirebon Dalam Angka 2016

3.5. KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN

Demikian pula halnya terhadap pembangunan di bidang pendidikan. Dibutuhkan tersedianya berbagai fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup dan layak. Dari data yang ada pada tahun 2016, jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 184 sekolah, kemudian untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah termasuk SLTP Terbuka berjumlah 54 sekolah. Untuk Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah berjumlah 58 sekolah.

Tabel 3.6
Indikator Ketersediaan Sarana Pendidikan
di Kota Cirebon, 2016

Tenaga/Sarana Pendidikan	2016
Jumlah Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)	184
Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)	54
Jumlah Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)	58

Berdasarkan data Cirebon Dalam Angka 2016

BAB IV

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONENNYA

Pemerintah Kota Cirebon senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi penduduknya. Berbagai perspektif pembangunan dilakukan, mulai dari meningkatkan pembangunan ekonomi sampai pembangunan manusia. Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang disertai dengan pembangunan dibidang kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas dan merata diseluruh lapisan masyarakat dan wilayah. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang sejajar dengan pemerataan distribusi pendapatan, maka jika sebagian besar masyarakat memperoleh pendapatan yang layak, mereka akan mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas individu dan keluarga, baik dibidang kesehatan maupun dibidang pendidikan. Disamping itu, dengan meningkatnya kualitas penduduk (kesehatan dan pendidikan), maka pada akhirnya akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Demikian dalam paradigma pembangunan manusia, yang meletakkan manusia sebagai pusat dari pembangunan, manusia bukan hanya sebagai alat bagi pembangunan, tetapi manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir dari pembangunan.

Dan untuk melihat gambaran tingkat kesejahteraan penduduk Kota Cirebon, diantaranya dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia (IPM). IPM ini memberikan gambaran taraf kesejahteraan dan kualitas penduduk di suatu wilayah, yang dilihat dari tiga dimensi dasar, yaitu dimensi kesehatan (angka harapan hidup pada waktu lahir), dimensi pengetahuan (Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita disesuaikan).

4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon Metode Baru

Melalui Indeks Pembangunan Manusia tergambar pencapaian kualitas manusia, yang dilihat melalui tiga indikator pokok. Dari Tabel di bawah ini tampak pencapaian IPM Kota Cirebon pada tahun 2016 sebesar 73,89. Menurut skala

international angka tersebut menunjukkan bahwa status pembangunan manusia di Kota Cirebon termasuk dalam klasifikasi tinggi.

Komponen IPM Kota Cirebon tahun 2016 adalah angka harapan hidup 71,81 tahun, angka harapan lama sekolah 13,18 tahun, rata-rata lama sekolah 9,97 tahun dan pengeluaran per kapita disesuaikan Rp 10.803 juta.

Pencapaian IPM tahun ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meningkat sebesar 0,55 poin. Dari angka IPM sebesar 73,34 persen pada tahun 2015 menjadi angka IPM sebesar 73,89 persen pada tahun 2016. Perkembangan IPM dan komponennya dari tahun 2013 sampai tahun 2016 dapat dilihat di tabel 4.1.

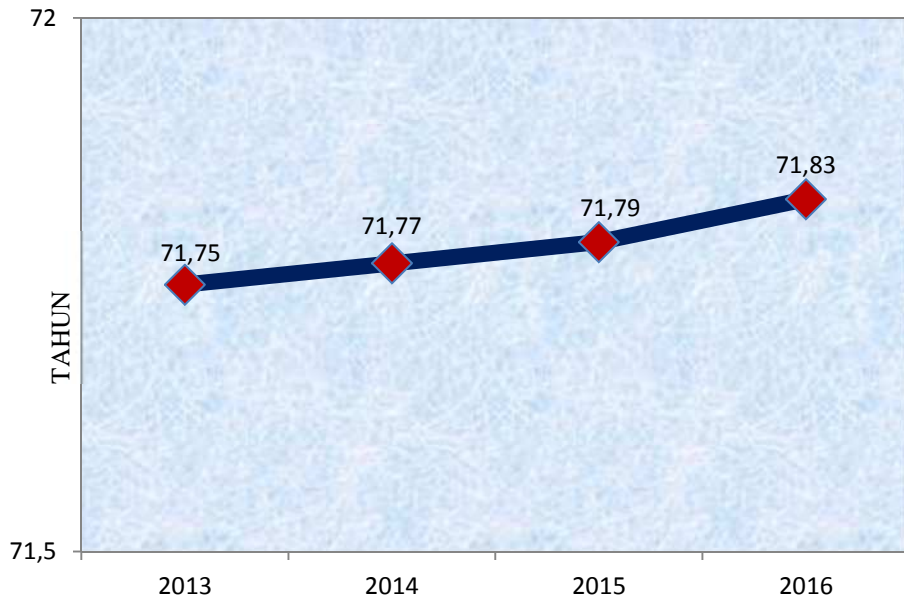
Tabel 4.1
Perkembangan IPM dan Komponennya di Kota Cirebon,
2013 – 2016 (Metode Baru)

Indikator	Komponen IPM			
	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (AHH)	71,75	71,77	71,79	71,81
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,58	12,93	12,94	13,18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,33	9,53	9,76	9,97
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu)	10.563	10.606	10.732	10.803
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,27	72,93	73,34	73,89

4.2. Kesehatan

Pada gambar 4.1 terlihat bahwa angka harapan hidup Kota Cirebon dari tahun 2013 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat Kota Cirebon untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia sudah semakin baik, kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup sehat juga semakin membaik.

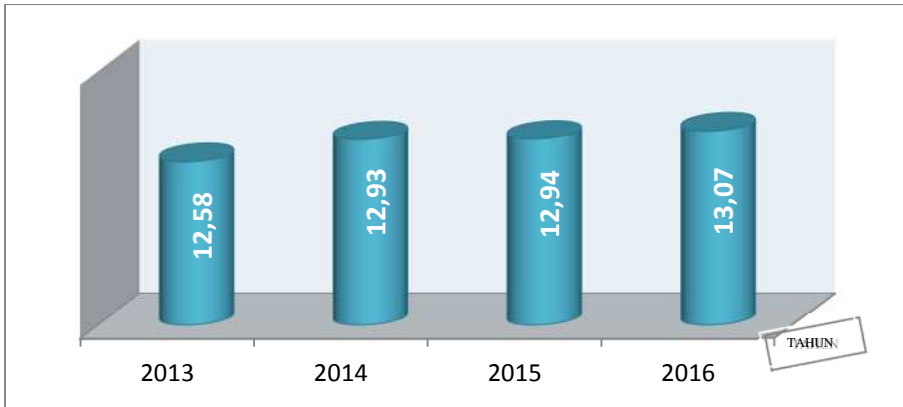
**Gambar 4.1. Angka Harapan Hidup Kota Cirebon
(Tahun)**



4.3. Pendidikan

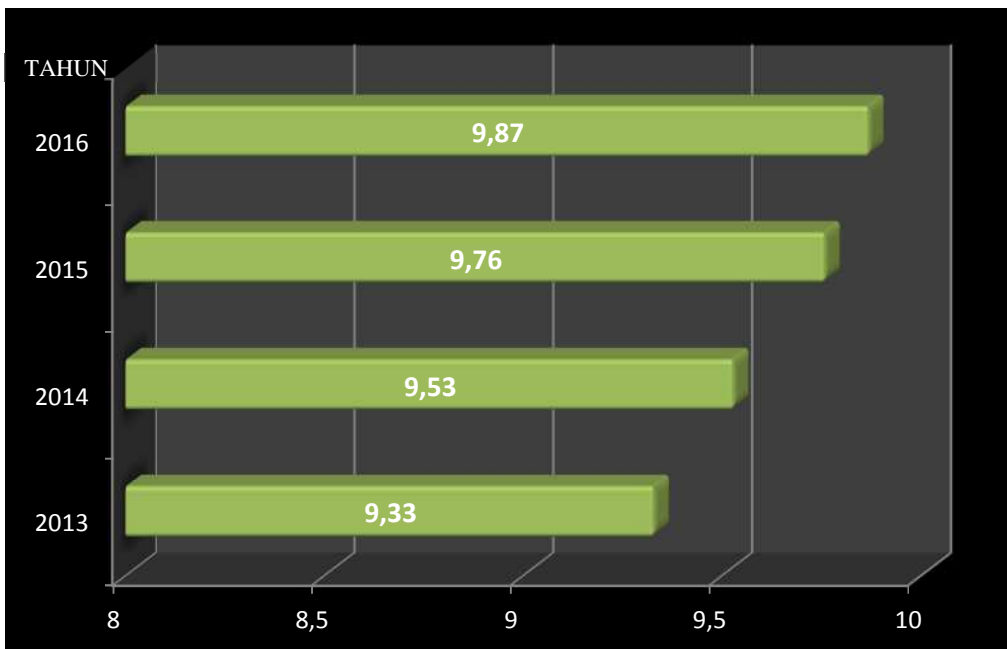
Pada gambar 4.2 terlihat bahwa angka harapan lama sekolah Kota Cirebon dari tahun 2013 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Angka HLS pada tahun 2013 sebesar 12,58 tahun, 2014 sebesar 12,93 tahun, 2015 sebesar 12,94 tahun dan 2016 sebesar 13,07 tahun.

Gambar 4.2. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Cirebon



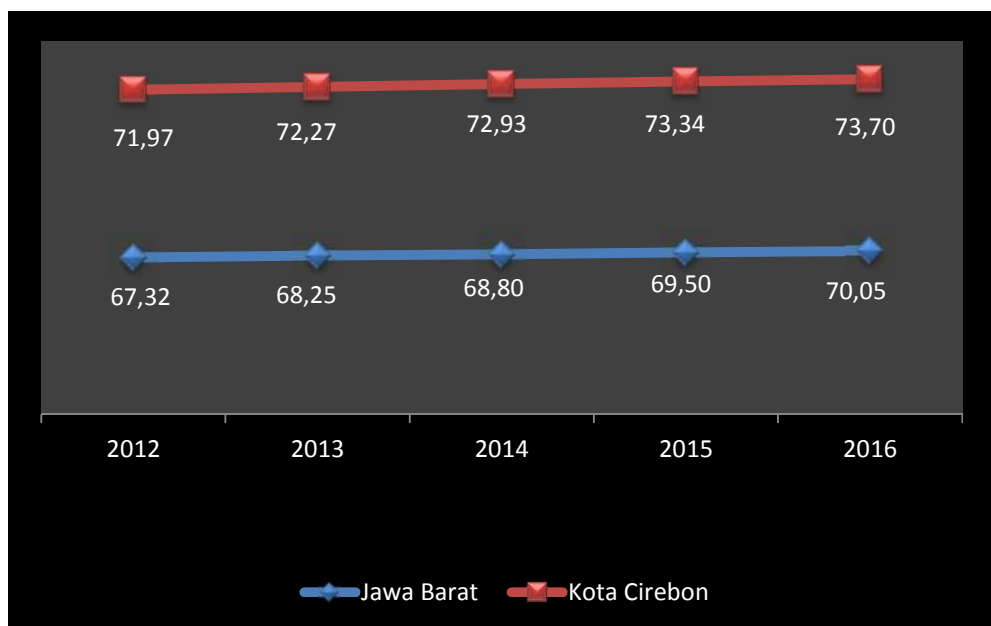
Komponen selanjutnya yaitu rata-rata lama sekolah Kota Cirebon dapat dilihat pada gambar 4.3. Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebesar 9,33, tahun 2014 sebesar 9,53, tahun 2015 sebesar 9,76 dan tahun 2016 sebesar 9,87 tahun

Gambar 4.3. Rata-rata Lama Sekolah Kota Cirebon



Pada gambar berikut terlihat bahwa angka IPM Kota Cirebon berada di atas IPM Provinsi Jawa Barat. Capaian IPM Kota Cirebon termasuk dalam klasifikasi tinggi yaitu berada pada kisaran $70 \leq \text{IPM} < 80$, sedangkan capaian IPM Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2015 masih berada di klasifikasi sedang yaitu berada di kisaran $60 \leq \text{IPM} < 70$, sedangkan mulai tahun 2016 sudah masuk dalam klasifikasi tinggi dengan nilai 70,05.

**Gambar 4.4. Pertumbuhan IPM Kota Cirebon
dan Provinsi Jawa Barat 2012-2015**



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Dengan IPM dapat diketahui keberhasilan program pembangunan yang telah dilakukan, sehingga dapat diperoleh gambaran taraf kesejahteraan dan kualitas penduduk.

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan tidak merata, kecamatan yang tingkat kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Pekalipan, sedangkan Kecamatan Harjamukti paling rendah tingkat kepadatannya. Kondisi ini masih menunjukkan fenomena yang sama dari tahun ke tahun.
2. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) proporsinya cukup tinggi menunjukkan struktur umur penduduk transisi dari penduduk muda ke penduduk tua. Jika kelompok umur ini lebih diberdayakan dapat menunjang pembangunan di segala bidang.
3. Pembangunan manusia di Kota Cirebon terus meningkat, hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia Kota Cirebon dari tahun 2013 sampai tahun 2016.
4. Derajat kesehatan penduduk Kota Cirebon sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari angka harapan hidup sudah tinggi dan terjadi peningkatan.
5. Capaian IPM Kota Cirebon lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat. Capaian IPM Kota Cirebon termasuk dalam klasifikasi tinggi yaitu berada pada kisaran $70 \leq \text{IPM} < 80$.

5.2. SARAN-SARAN

Pembangunan manusia di Kota Cirebon pada tahun 2016, telah menunjukkan peningkatan yang berarti, namun masih terus ditingkatkan mencapai angka yang ideal bagi tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Ada beberapa saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan perilaku hidup sehat seperti menjaga kebersihan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan air bersih yang berkualitas dan murah.
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan harus lebih berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengaksesnya. Begitu pula dengan penambahan jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.
3. Meningkatkan Kemampuan daya beli dengan membuka lapangan kerja seluas mungkin, dan perlu diberi kemudahan dalam melakukan usaha. Dominannya kelompok umur produktif menyebabkan kebutuhan akan lapangan kerja dan usaha menjadi lebih besar. Dengan demikian pembukaan lapangan kerja yang baru merupakan kebutuhan yang mendesak. Kesempatan kerja yang diberikan lebih diprioritaskan kepada penduduk yang berdomisili di Kota Cirebon, atau sebagai penduduk tetap Kota Cirebon sehingga tingkat kesempatan kerja yang lebih layak banyak diperoleh penduduk setempat.
4. Perlunya pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki etos kerja atau budaya kerja yang baik, karena hal ini berkaitan dengan persaingan usaha dan pasar tenaga kerja yang makin kompetitif.

LAMPIRAN

Tabel 1
Angka IPM dan Komponennya Kota Cirebon (Metode Baru)
Tahun 2013-2016

Tahun	Komponen IPM				IPM
	AHH	HLS	RLS	PPP	
1	2	3	4	6	7
2013	71,75	12,58	9,33	10.563	72,27
2014	71,77	12,93	9,53	10.606	72,93
2015	71,79	12,94	9,76	10.732	73,34
2016	71,83	13,07	9,87	10.824	73,70
2017*)	71,89	13,15	9,96	10.916	73,99

Catatan : *Angka sementara

Tabel 2
Angka IPM dan Komponennya Menurut Kecamatan
di Kota Cirebon, Tahun 2016 (Metode Baru)

No.	Kecamatan	Komponen Kesehatan		Komponen Pendidikan				Indeks	Komponen Daya Beli		IPM
		AHH	Indeks	HLS	Indeks	RLS	Indeks	Pendidikan	PPP	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Harjamukti	71,05	78,54	13,06	72,54	9,66	64,41	68,48	10.568,50	71,83	72,83
2	Lemahwungkuk	70,03	76,97	12,87	71,52	9,53	63,52	67,52	10.417,69	71,39	71,86
3	Pekalipan	70,40	77,54	12,93	71,86	9,58	63,87	67,86	10.471,92	71,55	72,21
4	Kesambi	72,67	81,03	13,35	74,18	9,89	65,92	70,05	10.809,56	72,51	74,39
5	Kejaksan	72,88	81,35	13,39	74,41	9,92	66,12	70,27	10.840,81	72,60	74,59
	Kota Cirebon	71,83	79,74	13,07	72,61	9,87	65,80	69,21	10.824,00	72,56	73,30

Tabel 3
Angka IPM dan Komponennya Menurut Kecamatan
di Kota Cirebon, Tahun 2017* (Metode Baru)

No.	Kecamatan	Komponen Kesehatan		Komponen Pendidikan				Indeks	Komponen Daya Beli		IPM
		AHH	Indeks	HLS	Indeks	RLS	Indeks	Pendidikan	PPP	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Harjamukti	71,32	78,95	13,11	72,82	9,70	64,66	68,74	10.608,66	71,94	73,09
2	Lemahwungkuk	70,30	77,38	12,92	71,79	9,56	63,77	67,78	10.457,28	71,50	72,11
3	Pekalipan	70,67	77,95	12,98	72,13	9,62	64,11	68,12	10.511,71	71,66	72,46
4	Kesambi	72,95	81,46	13,40	74,47	9,92	66,17	70,32	10.850,64	72,63	74,65
5	Kejaksan	73,16	81,78	13,44	74,69	9,96	66,37	70,53	10.882,00	72,72	74,86
	Kota Cirebon	71,89	79,83	13,15	73,06	9,96	66,40	69,73	10.916,00	72,81	73,99

Catatan : * Angka sementara

Tabel 4
Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kota Cirebon, Tahun 2016

No.	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+Perempuan	
		N	%	N	%	N	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harjamukti	53.536	50,51	52.451	49,49	105.987	100,00
2	Lemahwungkuk	27.908	50,94	26.880	49,06	54.788	100,00
3	Pekalipan	14.787	49,27	15.226	50,73	30.013	100,00
4	Kesambi	36.530	50,17	36.289	49,83	72.819	100,00
5	Kejaksan	21.467	48,91	22.420	51,09	43.887	100,00
Kota Cirebon		154.228	50,16	153.266	49,84	307.494	100,00

Catatan: Hasil Proyeksi

Tabel 5
Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Cirebon, Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km2
1	2	3	4	5
1	Harjamukti	17,62	107.019	6.073,72
2	Lemahwungkuk	6,51	55.320	8.497,70
3	Pekalipan	1,56	30.308	19.428,21
4	Kesambi	8,06	73.525	9.122,21
5	Kejaksan	3,62	44.314	12.241,44
Kota Cirebon		37,37	310.486	8.308,43

Catatan: Hasil Proyeksi

Tabel 6
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
di Kota Cirebon, Tahun 2016

No.	Kecamatan	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki+Perempuan			
		0-14	15-64	65+	Jumlah	0-14	15-64	65+	Jumlah	0-14	15-64	65+	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Harjamukti	15.868	36.288	1.884	54.040	14.746	35.912	2.321	52.979	30.614	72.200	4.205	107.019
2	Lemahwungkuk	7.525	19.585	1.061	28.171	7.035	18.518	1.596	27.149	14.560	38.103	2.657	55.320
3	Pekalipan	3.571	10.605	749	14.925	3.349	10.875	1.159	15.383	6.920	21.480	1.908	30.308
4	Kesambi	9.350	26.079	1.443	36.872	8.789	26.005	1.859	36.653	18.139	52.084	3.302	73.525
5	Kejaksan	5.436	15.277	956	21.669	5.152	16.093	1.400	22.645	10.588	31.370	2.356	44.314
Kota Cirebon		41.750	107.834	6.093	155.677	39.071	107.403	8.335	154.809	80.821	215.237	14.428	310.486

Catatan: Hasil Proyeksi

Tabel 7
 Persentase Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
 di Kota Cirebon, Tahun 2016

No.	Kecamatan	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki+Perempuan			
		0-14	15-64	65+	Jumlah	0-14	15-64	65+	Jumlah	0-14	15-64	65+	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Harjamukti	29,36	67,15	3,49	100,00	27,83	67,79	4,38	100,00	28,61	67,46	3,93	100,00
2	Lemahwungkuk	26,71	69,52	3,77	100,00	25,91	68,21	5,88	100,00	26,32	68,88	4,80	100,00
3	Pekalipan	23,93	71,06	5,02	100,00	21,77	70,69	7,53	100,00	22,83	70,87	6,30	100,00
4	Kesambi	25,36	70,73	3,91	100,00	23,98	70,95	5,07	100,00	24,67	70,84	4,49	100,00
5	Kejaksan	25,09	70,50	4,41	100,00	22,75	71,07	6,18	100,00	23,89	70,79	5,32	100,00
	Kota Cirebon	26,82	69,27	3,91	100,00	25,24	69,38	5,38	100,00	26,03	69,32	4,65	100,00

Catatan: Hasil Proyeksi

Tabel 8
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur
di Kota Cirebon, Tahun 2017

Laki-laki																
No.	Kecamatan	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Harjamukti	5.533	5.187	5.287	5.120	4.455	4.394	4.652	4.232	3.869	3.240	2.664	2.485	1.490	1.899	54.507
2	Lemahwungkuk	2.625	2.467	2.498	2.774	2.563	2.476	2.472	2.092	2.055	1.640	1.549	1.279	853	1.069	28.412
3	Pekalipan	1.315	1.144	1.141	1.277	1.327	1.336	1.334	1.142	1.051	910	912	832	571	754	15.046
4	Kesambi	3.222	3.068	3.141	3.505	3.376	3.256	3.171	2.888	2.756	2.475	2.100	1.664	1.112	1.454	37.188
5	Kejaksan	1.900	1.785	1.798	2.022	1.938	1.849	1.823	1.650	1.676	1.388	1.256	1.092	712	963	21.852
Kota Cirebon		14.595	13.651	13.865	14.698	13.659	13.311	13.452	12.004	11.407	9.653	8.481	7.352	4.738	6.139	157.005

Perempuan																
No.	Kecamatan	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Harjamukti	5.069	4.838	4.983	4.812	4.347	4.401	4.712	4.124	3.854	3.364	2.983	2.302	1.369	2.344	53.502
2	Lemahwungkuk	2.410	2.360	2.334	2.539	2.230	2.222	2.156	1.974	2.012	1.813	1.618	1.313	822	1.612	27.415
3	Pekalipan	1.152	1.039	1.192	1.449	1.212	1.187	1.189	1.043	1.167	1.068	1.069	933	668	1.171	15.539
4	Kesambi	3.025	2.844	3.006	3.715	3.251	3.057	3.075	2.910	2.886	2.513	2.107	1.709	1.038	1.877	37.013
5	Kejaksan	1.806	1.644	1.752	2.159	1.927	1.794	1.781	1.723	1.777	1.628	1.471	1.167	824	1.414	22.867
Kota Cirebon		13.462	12.725	13.267	14.674	12.967	12.661	12.913	11.774	11.696	10.386	9.248	7.424	4.721	8.418	156.336

Laki-laki+Perempuan																
No.	Kecamatan	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Harjamukti	10.602	10.025	10.270	9.932	8.802	8.795	9.364	8.356	7.723	6.604	5.647	4.787	2.859	4.243	108.009
2	Lemahwungkuk	5.035	4.827	4.832	5.313	4.793	4.698	4.628	4.066	4.067	3.453	3.167	2.592	1.675	2.681	55.827
3	Pekalipan	2.467	2.183	2.333	2.726	2.539	2.523	2.523	2.185	2.218	1.978	1.981	1.765	1.239	1.925	30.585
4	Kesambi	6.247	5.912	6.147	7.220	6.627	6.313	6.246	5.798	5.642	4.988	4.207	3.373	2.150	3.331	74.201
5	Kejaksan	3.706	3.429	3.550	4.181	3.865	3.643	3.604	3.373	3.453	3.016	2.727	2.259	1.536	2.377	44.719
Kota Cirebon		28.057	26.376	27.132	29.372	26.626	25.972	26.365	23.778	23.103	20.039	17.729	14.776	9.459	14.557	313.341

Catatan: Hasil Proyeksi



SATU DATA KOTA CIREBON

PLAC3T066VNDER